



# RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH

**TAHUN 2023**

**KECAMATAN WANAYASA  
KABUPATEN PURWAKARTA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur yang kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ( Renja Perangkat Daerah ) Tahun 2023 SKPD Kecamatan Wanayasa dapat diselesaikan.

RENJA Perubahan Kecamatan Wanayasa Tahun 2023 ini merupakan pedoman bagi Kantor Kecamatan Wanayasa dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta evaluasi kinerja atas capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Besar harapan Kami kiranya Renja Perubahan Kecamatan Wanayasa Tahun 2023 ini kiranya dapat dimanfaatkan oleh segenap Stakeholder (pemangku kepentingan) dan dinas instansi terkait lainnya guna menyusun perencanaan dan proyek pembangunan sekaligus merealisasi program-program Pemerintah Kecamatan Wanayasa.

Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan ini adalah salah satu bentuk untuk membuktikan kesungguhan kami dalam menjalankan tugas dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat secara maksimal dan seoptimal mungkin.

Dengan segala kerendahan hati kami memohon maaf kiranya dalam proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 SKPD Kecamatan Wanayasa ini terdapat kekurangan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi segenap masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Wanayasa, Agustus 2023

CAMAT WANAYASA,



**HERYADI ERLAN WD, S.STP**

NIP. 19760505 199603 1 003

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan daerah sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder).

Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 yang telah dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2023 sudah dilakukan penyesuaian dan penyeselarasan terhadap program prioritas pembangunan dan arah kebijakan daerah dengan kebijakan Pusat dalam rangka mendukung program-program prioritas nasional di daerah

Renja Perubahan Kecamatan Wanayasa adalah dokumen perencanaan Kantor Kecamatan Wanayasa untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari Perubahan RKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor

95 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 serta Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Kecamatan Wanayasa sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang mempunyai kewajiban menyusun Renja Perangkat Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Wanayasa Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
24. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor );
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, seri E);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252)
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan

- Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
  34. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor );
  35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  36. Peraturan Bupati Puwakarta Nomor 95 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
  37. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja Perubahan Tahun 2023 ini yaitu sebagai upaya bagi kami untuk terciptanya tertib hukum dan administrasi seiring dengan berubahnya perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan

kegiatan pembangunan di Kantor Kecamatan Wanayasa serta mengevaluasi hasil kinerja setiap tahun berdasarkan capaian indikator program yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan disusunnya Renja Perubahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai penjabaran dari Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- b. Sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.
- c. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
- d. Sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun sebagai berikut :

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini memuat uraian latar belakang penyusunan Renja Perangkat Daerah, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

#### **BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

Bab ini memuat tentang evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II Tahun 2023 dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, isu – isu penting penyelerasan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

#### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat rencana kerja masing - masing seksi dan urusan serta pendanaan atas program dan kegiatan.

#### **BAB IV PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II**

Tahun 2023 jumlah anggaran program dan kegiatan Kecamatan Wanayasa yaitu sebesar Rp. 3.908.525.265 terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. 3.846.529.465 dan Belanja Modal sebesar Rp. 924.654.937.

Realisasi pelaksanaan anggaran belanja operasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp.3.492.169.556 Atau terserap 93.57 % dan realisasi belanja modal sebesar Rp. 83.550.250 Atau terserap 99.19 %. Dari 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan yang di rencanakan pada tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 ada ... sub kegiatan yang belum direali

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja Kecamatan Wanayasa sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat di lihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sampai Triwulan II Tahun 2023

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Serapan (%)
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Capaian Sakip Perangkat Daerah Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran</b>	<b>B opini</b>  <b>80%</b>	<b>3.768.000.265</b>	<b>1.848.112.740</b>	<b>49.05</b>
<b>1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun</b>	<b>5 dok</b>	<b>31.390.400</b>	<b>17.850.800</b>	<b>56.87</b>
1.1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dok	8.275.900	-	
1.2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil	1 dok	6.231.700	5.356.700	85.96

		koodinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD				
1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koodinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dok	5.218.100	4.718.100	90.42
1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dok	8.136.000	7.776.000	95.68
1.5	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 dok	3.528.700	-	
<b>2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<i>Jumlah laporan administrasi keuangan yang disusun</i>	<b>2 laporan</b>	<b>2.943.499.228</b>	<b>1.561.221.982</b>	<b>53.04</b>
2.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21 org/bulan	2.921.874.528	1.554.971.682	53.22
2.2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD	1 laporan	17.750.300	6.250.300	35.21
2.3	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan SKPD	4 laporan	3.874.400	-	
<b>3.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD</b>	<b>1 laporan</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>24.00</b>
3.1	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	<i>Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD</i>	1 laporan	5.000.000	1.200.000	24.000
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pengadaan pakaian dinas yang tersedia</b>	<b>2 paket</b>	<b>32.300.000</b>	-	
4.1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	2 paket	32.300.000	-	

<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pemenuhan alat listrik/ penerangan bangunan kantor, jumlah pemenuhan peralatan rumah tangga, jumlah pemenuhan logistic kantor, jumlah pemenuhan barang cetakan dan penggandaan dan jumlah koordinasi perjalanan dinas yang disediakan</b>	<b>38 jenis</b>	<b>118.415.137</b>	<b>26.117.000</b>	<b>22.06</b>
5.1	Penyediaan komponen instalasi listrik	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	8.110.300	3.725.000	45.93
5.2	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	9.470.900	1.714.000	18.10
5.3	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	5 paket	50.663.937	11.098.000	21.91
5.4	Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	8.750.000	1.000.000	11.43
5.5	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	41.420.000	8.580.000	20.71
<b>5.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah</b>	<b>66 unit</b>	<b>61.995.800</b>		<b>-</b>
5.1	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	64 unit	31.997.000		-
5.2	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	29.998.800		-
<b>6.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jasa komunikasi sda dan listrik yang disediakan dan jumlah pegawai non ASN yang disediakan</b>		<b>474.881.500</b>	<b>216.236.158</b>	<b>45.53</b>
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sda	12 laporan	26.952.660	8.965.288	33.26

		dan listrik yang disediakan				
6.2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	447.928.840	207.270.870	46.27
<b>7.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>21 unit</b>	<b>100.518.200</b>	<b>25.486.800</b>	<b>25.36</b>
7.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perjinannya	9 unit	39.800.000	14.295.800	35.92
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	7.300.000	2.500.000	34.25
7.2	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	53.418,200	8.691.000	16.27
<b>II</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan</b>	<b>80 %</b>	<b>31.625.000</b>	<b>25.625.000</b>	<b>81.03</b>
<b>1.</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan</b>	<b>1 keg</b>	<b>20.825.000</b>	<b>20.825.000</b>	<b>100</b>
1.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	1 LKD	20.825.000	20.825.000	100
<b>2.</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dilaksanakan</b>	<b>1 keg</b>	<b>10.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>44.44</b>
2.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	3 LKD	10.800.000	4.800.000	44.44
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan</b>	<b>80 %</b>	<b>40.100.000</b>	-	

	<b>UMUM</b>	<b>umum yang dilaksanakan</b>				
<b>1.</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah kegiatan bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional</b>	<b>1 keg</b>	<b>40.100.000</b>	-	
1.1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	50 org	40.100.000	-	
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan</b>	<b>80 %</b>	<b>68.800.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>6.83</b>
<b>1.</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah kegiatan fasilitasi rekomendasi pembinaan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan</b>	<b>6 keg</b>	<b>68.800.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>6.83</b>
1.1	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan perdes dan perkades	2 dokumen	15.600.000	-	
1.2	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pedes	2 dokumen	12.000.000	-	
1.3	Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas kades dan perangkat	1 dokumen	8.600.000	3.700.000	43.02
1.4	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan permusyawaratan masyarakat	1 dokumen	8.400.000	-	
1.5	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	3 kegiatan	11.000.000	-	
1.6	Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga	Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka	1 kegiatan	13.200.000	1.000.000	7.58

	kemasyarakatan	pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga kemasyarakatan				
<b>Jumlah</b>				<b>3.908.525.265</b>	<b>1.878.437.740</b>	<b>48.06</b>

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Program dan Kegiatan**

Rencana program dan kegiatan OPD Kecamatan Wanayasa merupakan penjabaran langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Renstra SKPD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun perubahan program dan kegiatan yang menjadi rencana kerja OPD Kecamatan Wanayasa Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

#### ***I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
  - c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;

- b. Penyediaan peralatan rumah tangga;
- c. Penyediaan bahan logistik kantor;
- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Pengadaan mebel;
  - b. Pengadaan peralatan mesin dan lainnya.
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
  - b. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
  - b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
  - c. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

## **II. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

- 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa;

## **III. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

- 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
  - a. Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan ( Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.

## **IV. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- 1. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - a. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
  - b. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
  - c. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;

- d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- e. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- f. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- g. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- h. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.

### 3.2 Rencana Pendanaan

Rencana Kerja dan Pendanaan Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan Tahun 2023, dapat dilihat pada 3.1

Tabel 3.1

Rencana Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Tahun 2023

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Jumlah Anggaran	
				2022	2023
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran		<b>3.816.525.265</b>	<b>3.788.000.265</b>
1	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>29.140.000</b>	<b>31.390.400</b>
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah	6.280.000	10.275.900
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah	9.240.000	6.231.700

1.3	Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD		Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah	-	5.218.100
1.4	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah	9.260.000	8.136.000
1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah	4.360.000	3.528.700
<b>2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>2.841.074.528</b>	<b>2.943.499.228</b>
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.829.874.528	2.921.874.528
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.000.000	17.750.300
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / triwulanan / semesteran SKPD		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.200.000	3.874.400
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>		<b>Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.000.000</b>
3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5.600.000	5.000.000
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>5.332.500</b>	<b>32.300.000</b>
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Meningkatnya Pemenuhan Pakaian Dinas	5.332.500	32.300.000

<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>109.983.897</b>	<b>136.415.137</b>
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.398.300	11.733.900
5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.092.250	11.546.900
5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	55.823.347	60.664.337
5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.990.000	14.750.000
5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.680.000	37.720.000
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>84.257.300</b>	<b>61.995.800</b>
6.1	Pengadaan Mebel		Meningkatnya Kualitas Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	26.333.200	31.997.000
6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Meningkatnya Kualitas Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	57.914.100	29.998.000
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>424.465.840</b>	<b>474.881.500</b>
7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.955.000	26.952.660
7.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	397.510.840	447.928.840
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>			<b>188.100.000</b>	<b>100.518.200</b>

	<b>Pemerintahan Daerah</b>				
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan		Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah	39.800.000	39.800.000
8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah	9.800.000	7.300.000
8.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah	138.500.000	53.418.200
<b>II</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>25.691.200</b>	<b>31.625.000</b>
<b>9</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>			<b>25.691.200</b>	<b>20.825.000</b>
9.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang Desa		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Hasil Musrenbang Kecamatan	25.691.200	20.825.000
<b>10.</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		<b>Meningkatnya SDM Lembaga Kemasyarakatan</b>	<b>-</b>	<b>10.800.000</b>
10.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Meningkatnya SDM Lembaga Kemasyarakatan	-	10.800.000
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			<b>11.900.000</b>	<b>34.400.000</b>
<b>11</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Derah</b>			<b>11.900.000</b>	<b>40.100.000</b>
11.1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan ( Bimtek Wasbang )		Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	11.900.000	40.100.000
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGASAWAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>90.990.000</b>	<b>68.800.000</b>
<b>12</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		<b>Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah</b>	<b>90.990.000</b>	<b>68.800.000</b>

			<b>Desa</b>		
12.1	Fasilitasi Penyusunan Perdes dan Perkades		Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengasawan Pemerintah Desa	9.270.000	15.600.000
12.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pempdes		Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengasawan Pemerintah Desa	13.800.000	12.000.000
12.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kades dan Perangkat Desa		Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengasawan Pemerintah Desa	6.900.000	8.600.000
12.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bamusdes		Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengasawan Pemerintah Desa	10.170.000	8.400.000
12.5	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengasawan Pemerintah Desa	12.270.000	-
12.6	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban		Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengasawan Pemerintah Desa	19.180.000	11.000.000
12.7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban LKD		Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengasawan Pemerintah Desa	9.540.000	13.200.000
12.8	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengasawan Pemerintah Desa	9.860.000	-
<b>Jumlah</b>				<b>3.816.525.265</b>	<b>3.928.525.265</b>

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023

**Formulir  
RKPA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Wanayasa

**REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																			
7 01	<b>KECAMATAN</b>																			
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>																			
7 01 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																			
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Wanayasa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							8,275,900	0	0	0	8,275,900	10,275,900	0	0	0	10,275,900	2.000.000	
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Kecamatan Wanayasa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							6,231,700	0	0	0	6,231,700	6,231,700	0	0	0	6,231,700	0	
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Kecamatan Wanayasa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							5,218,100	0	0	0	5,218,100	5,218,100	0	0	0	5,218,100	0	
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kecamatan Wanayasa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							8,136,000	0	0	0	8,136,000	8,136,000	0	0	0	8,136,000	0	
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Wanayasa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							3,528,700	0	0	0	3,528,700	3,528,700	0	0	0	3,528,700	0	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																			
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Wanayasa)	Dana Perimbangan							2,921,874,528	0	0	0	2,921,874,528	2,921,874,528	0	0	0	2,921,874,528	0	
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kecamatan Wanayasa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							17,750,300	0	0	0	17,750,300	17,750,300	0	0	0	17,750,300	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Kecamatan Wanayasa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,874,400	0	0	0	3,874,400	3,874,400	0	0	0	3,874,400	0	
7	01	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Kecamatan Wanayasa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
7	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>32,300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,300,000</b>	<b>32,300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,300,000</b>	<b>0</b>	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Kecamatan Wanayasa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			32,300,000	0	0	0	32,300,000	32,300,000	0	0	0	32,300,000	0	
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>118,415,137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118,415,137</b>	<b>136,415,137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136,415,137</b>	<b>18.000.000</b>	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Wanayasa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,110,300	0	0	0	8,110,300	11,733,900	0	0	0	11,733,900	3.623.600	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kecamatan Wanayasa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Purwakarta, Wanayasa, Wanayasa		9,470,900	0	0	0	9,470,900	11,546,900	0	0	0	11,546,900	2.076.000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Wanayasa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,663,937	0	0	0	50,663,937	60,664,337	0	0	0	60,664,337	10.000.400	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kecamatan Wanayasa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,750,000	0	0	0	8,750,000	14,750,000	0	0	0	14,750,000	6.000.000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Wanayasa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			41,420,000	0	0	0	41,420,000	37,720,000	0	0	0	37,720,000	(3.700.000)	
7	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>0</b>	<b>61,995,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61,995,800</b>	<b>0</b>	<b>61,995,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61,995,800</b>	<b>0</b>	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel (Kecamatan Wanayasa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	31,997,000	0	0	31,997,000	0	31,997,000	0	0	31,997,000	0	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH			0	29,998,800	0	0	29,998,800	0	29,998,800	0	0	29,998,800	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											T+1	
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						Bertambah/ (Berkurang)
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					(Kecamatan Wanayasa)	(PAD)														
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>474,881,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474,881,500</b>	<b>474,881,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474,881,500</b>	<b>0</b>	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Wanayasa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			26,952,660	0	0	0	26,952,660	26,952,660	0	0	0	26,952,660	0	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Wanayasa)	Dana Perimbangan			447,928,840	0	0	0	447,928,840	447,928,840	0	0	0	447,928,840	0	
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>100,518,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,518,200</b>	<b>100,518,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,518,200</b>	<b>0</b>	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kecamatan Wanayasa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			39,800,000	0	0	0	39,800,000	39,800,000	0	0	0	39,800,000	0	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Wanayasa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,300,000	0	0	0	7,300,000	7,300,000	0	0	0	7,300,000	0	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kecamatan Wanayasa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Purwakarta, Wanayasa, Wanayasa		53,418,200	0	0	0	53,418,200	53,418,200	0	0	0	53,418,200	0	
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>				<b>31,625,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,625,000</b>	<b>31,625,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,625,000</b>	<b>0</b>	
7	01	03	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>				<b>20,825,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,825,000</b>	<b>20,825,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,825,000</b>	<b>0</b>	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Kecamatan Wanayasa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,825,000	0	0	0	20,825,000	20,825,000	0	0	0	20,825,000	0	
7	01	03	2.03		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>				<b>10,800,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,800,000</b>	<b>10,800,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,800,000</b>	<b>0</b>	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan Wanayasa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Purwakarta, Wanayasa, Wanayasa		10,800,000	0	0	0	10,800,000	10,800,000	0	0	0	10,800,000	0	
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>				<b>40,100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,100,000</b>	<b>40,100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,100,000</b>	<b>0</b>	
7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>				<b>40,100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,100,000</b>	<b>40,100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,100,000</b>	<b>0</b>	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Kecamatan Wanayasa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			40,100,000	0	0	0	40,100,000	40,100,000	0	0	0	40,100,000	0	
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>				<b>68,800,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68,800,000</b>	<b>68,800,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68,800,000</b>	<b>0</b>	
7	01	06	2.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>				<b>68,800,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68,800,000</b>	<b>68,800,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68,800,000</b>	<b>0</b>	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Kecamatan Wanayasa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,600,000	0	0	0	15,600,000	15,600,000	0	0	0	15,600,000	0	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Kecamatan Wanayasa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Kecamatan Wanayasa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,600,000	0	0	0	8,600,000	8,600,000	0	0	0	8,600,000	0	
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Kecamatan Wanayasa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Purwakarta, Wanayasa, Wanayasa		8,400,000	0	0	0	8,400,000	8,400,000	0	0	0	8,400,000	0	
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Wanayasa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11,000,000	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan Wanayasa)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			13,200,000	0	0	0	13,200,000	13,200,000	0	0	0	13,200,000	0	

**BAB V**  
**PENUTUP**

Demikian Perubahan Rencana dan Program Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Wanayasa Tahun 2023 ini kami buat, besar harapan kami dengan dibuatnya Rencana Kerja ini dapat memberikan manfaat yang sebesar – besarnya bagi para pemangku kepentingan di wilayah Kecamatan Wanayasa.

Wanayasa, Agustus 2023

CAMAT WANAYASA,



**HERYADI ERLAN WD, S.STP**  
NIP. 19760505 199603 1 003

**LEMBAR VERIFIKASI PERUBAHAN RENJA 2023**

NAMA PD : Kecamatan Wanayasa

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI	
		ADA	TIDAK ADA
1	2	3	4
1	<p>SISTEMATIKA :</p> <p>BAB I PENDAHULUAN</p> <p>BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN</p> <p>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</p> <p>BAB IV PENUTUP</p>	✓	
2	<p>BAB I PENDAHULUAN</p> <p>1.1. Latar Belakang</p> <p>Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/ kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.</p>	✓	
	<p>1.2. Landasan Hukum</p> <p>Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.</p>	✓	
	<p>1.3. Maksud dan Tujuan</p> <p>Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah.</p>	✓	
	<p>1.4. Sistematika Penulisan</p> <p>Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.</p>	✓	
3	<p>BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN</p> <p>Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sampai pada Triwulan II, yang memuat <u>target capaian /realisasi indikator program</u> dan kegiatan, serta <u>permasalahan pelaksanaan kegiatan</u>.</p> <p><i>Capaian telah dilengkapi dgn Indikator &amp; Target</i></p>	✓	

*lampirkan juga permasalahan*

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI	
		ADA	TIDAK ADA
1	2	3	4
4	<p>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</p> <p>Bab ini mengemukakan prioritas pembangunan dan perubahan rencana kerja program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif pada perubahan dan disajikan dalam table matrik</p>	✓	agar dilengkapi dengan tabel program kerja
5	<p>BAB IV PENUTUP</p> <p>Berisikan uraian penutup</p>	✓	
6	<p>KESESUAIAN DENGAN RKPD PERUBAHAN</p> <p>Memuat kesesuaian pagu anggaran, indikator kinerja dan target program dan kegiatan Renja Perubahan dengan RKPD Perubahan</p>		—

CATATAN TINDAK LANJUT :

- 22/9/2023 - Tolak Cele penulisan, tata bahasa dan ejaan.
- Bab II agar mengikuti petunjuk, tabel yg disajikan mencakup program, kegiatan, sub kegiatan, target, indikator dan anggaran. - Bab III juga agar mengikuti petunjuk agar tabel matriknya lengkap bisa audit dr RKPD Perubahan 2023 dan buat sendiri dan memperhatikan petunjuk.

KASUBAG PROGRAM/PERENCANAAN



(Dede Iwan Setiawan .....)  
NIP. 19830407 200301 1004

PURWAKARTA,

VERIFIKATOR,



(WPA Mulla Purati, SKM .....)  
NIP. 19820709 200604 2011

MENGETAHUI,  
KEPALA BIDANG.....



(H. Marnawan .....)  
NIP. 19660115 199010 1002

